



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DOI: <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/4154>

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL MANUSCRIPTS AT REGIONAL FINANCE AND ASSETS AGENCY NORTH SULAWESI PROVINCE

Goinpeace H. Tumbel¹, Evi Masengi², Frilly J.Jacop³

Program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia^{1,2,3}

goinpeacetumbel@unima.ac.id

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received date: 11 November 2023

Revised date: 15 November 2023

Accepted date: 14 November 2023

ABSTRACT

This research aims to identify and describe the implementation of the official script system in the financial management body and heritage in the province of North Sulawesi. The research method used is descriptive qualitative. In this study the aims were to identify and describe the message registration process that was tried at BKAD and to identify and describe the obstacles in the registration process that was tried at BKAD. based on applicable regulations or SOP. The second is Supervision, in the implementation of official scripts at the financial management agency and the legacy of the North Sulawesi province region has been covered. As well as the third, the behavior of the executor, from the implementation of official scripts in the financial management agency and the legacy of the North Sulawesi province area is still very lacking, the routine in managing messages is still the same.

Keywords: *Implementation of official document placement in regional financial institutions and North Sulawesi provincial assets*

ABSTRAKSI

Proses pelayanan publik memang terhisap dalam pandangan banyaknya waktu, pertemuan dengan beberapa orang atau penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan pelaksanaan tata naskah dinas pada badan pengelola keuangan dan kekayaan daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan proses tata naskah dinas yang dilakukan di BKAD serta mengidentifikasi dan mendeskripsikan hambatan dalam proses tata naskah dinas yang dilakukan di BKAD berdasarkan peraturan atau SOP yang berlaku. Yang kedua adalah Pengawasan, dalam pelaksanaan tata naskah dinas di badan pengelolaan keuangan dan barang peninggalan daerah provinsi Sulawesi Utara telah tercakup. Serta yang ketiga, perilaku pelaksana, dari pelaksanaan tata naskah dinas di badan pengelolaan keuangan dan warisan daerah provinsi Sulawesi Utara masih sangat kurang, rutinitas dalam mengelola pesan masih sama.

Kata Kunci: Pelaksanaan tata naskah dinas di badan pengelola keuangan dan kekayaan daerah provinsi Sulawesi Utara

PENDAHULUAN

Memiliki nilai-nilai pendidikan karakter yang Naskah dinas adalah pengaturan tentang jenis dan format, teknik penyuntingan, hak tanda tangan, dan keamanan naskah dinas yang digunakan dalam komunikasi dinas. Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) No. 5/2021 ayat 1 ayat 2 ayat 2 ayat 2 Petunjuk Umum Penataan Naskah Dinas Naskah Dinas adalah data tertulis yang merupakan pemberitahuan resmi yang dibuat dan/atau diterima oleh badan yang berwenang dari masing-masing badan otonom negara dan daerah. dengan pelaksanaan kegiatan komersial. dan pengembangan. Misi (PERANRI, 2021). Di dalam kantor selalu ada kebutuhan akan komunikasi yang tujuannya adalah menyampaikan informasi tanpa harus bertemu langsung dengan orangnya melalui komunikasi tertulis yang disebut surat. Surat dapat dijadikan pembenaran atau bukti untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, karena surat merupakan tanda yang sah dari suatu perintah yang kuat, dibuktikan dengan tanda tangan penulis surat itu. Menulis dan mengatur surat membutuhkan perhatian khusus untuk menyampaikan maksud dan tujuan dengan baik. Menulis surat membutuhkan pemahaman tentang bahasa dan konsep format surat. Hal ini dimaksudkan agar penerima surat dapat memahami dengan baik maksud dari surat tersebut. Bagian-bagian surat yang biasanya dicantumkan dalam surat, khususnya surat resmi, seperti surat, tanggal surat, nomor surat, alamat tujuan, badan surat, nama pengirim, dan salinannya. Fungsi surat juga untuk menyampaikan suatu pesan atau maksud tertentu dari pengirim kepada penerima yang dituju. Saat menulis surat resmi, ada bagian surat yang biasanya berbentuk surat, yaitu. penomoran surat Penomoran huruf adalah kegiatan pemberian nomor dan kode pada huruf. Fakta bahwa surat resmi itu formal dan memiliki aturan dan etika memang patut dipertimbangkan. "Implementasi kebijakan publik adalah pelaksanaan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah, yang mempunyai kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik melalui perumusan kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik penting karena kebijakan publik yang dirumuskan menunjukkan kepentingannya dalam implementasi.. sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan pembuat keputusan karena keputusan tersebut membolehkan apa yang dilarang keras atau sebaliknya... dengan alasan tertentu seperti alasan kemanusiaan, darurat dll. Istilah kebijakan menurut

Shafritz dan Russel (Keban 2004) adalah keputusan politik dan bersifat hirarkis dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah (street level). Dalam hal ini, kebijakan dibuat untuk menjawab permasalahan yang berkembang. Publik, dari perspektif politik, adalah seseorang atau sekelompok orang, hubungan publik dan komunitas, yang dibagi menurut kepentingan yang berbeda. Konsep publik dari perspektif politik berbeda dengan konsep umum, karena dari perspektif kebijakan publik, tujuan kebijakan merupakan segmen-segmen tertentu yang bergantung pada kekhususan masalah dan jenis kebijakan yang ada. Namun secara umum publik juga dapat mencakup publik "private/customer", tentunya orientasi publik ini sangat berbeda dengan opini politik publik dan opini publik pada umumnya.(Tumbel, 2021). mempertimbangkan pandangan Wahab (1997) dan Denhardt. Menurut Denhardt, "implementasi adalah tahapan tindakan atau kegiatan di mana semua perencanaan dirumuskan menjadi suatu kebijakan operasional. Implementasi kebijakan masih dianggap sebagai implementasi keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi dapat juga mengambil bentuk bentuk keputusan besar .perintah eksekutif atau perintah atau putusan pengadilan." (Purwanto & Sulistyastuti, 2012). Surat korespondensi merupakan bagian yang sangat penting dalam pekerjaan organisasi atau lembaga, karena surat dapat digunakan sebagai komunikasi tertulis dan juga sebagai sumber informasi bagi organisasi atau lembaga. (*Jeane Elisabeth Langkai - Google Scholar*, n.d.). Menurut Wursanto (1991) dalam bukunya "Arsip 1", surat adalah sarana penyampaian informasi atau pernyataan (keputusan, pernyataan, pemberitahuan, permintaan, dan lain-lain) secara tertulis dari satu pihak ke pihak lain.(Wursanto (1991) dalam bukunya "Kearsipan 1," 2019). Namun berdasarkan hasil observasi awal peneliti di lokasi penelitian, banyak ditemukan kesalahan ejaan pada nomor surat dinas BKAD. Hal ini dikarenakan dalam proses penulisan surat, pegawai tidak mengetahui aturan korespondensi formal, tidak teliti dan menyalin surat-surat lama. Kesalahan penomoran surat dinas, salah satunya ditemukan pada penggunaan huruf di belakang nomor surat. Peran penomoran huruf berbasis tema merupakan kegiatan penting dalam lembaga negara. Namun terkadang masih ada pegawai yang tidak mepedulikan peran tersebut, yaitu pegawai tidak mengetahui cara penulisan penomoran surat yang

benar.. Melihat permasalahan diatas, maka peneliti dalam hal ini tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut melalui sebuah penelitian. . berjudul “Penerapan Sistem Pendokumentasian Dinas pada Lembaga Keuangan Daerah dan Aset Provinsi Sulawesi Utara”

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan Buku Pedoman Dinas yang dilakukan di Badan Perekonomian dan Kegiatan Daerah. Fokus penelitian ini antara lain dibahas: prosedur, pengawasan, sikap pelaksana.. Sumber informasi dalam penelitian ini ada 2 yaitu: purposive sampling atau key informan dan snowball sampling atau menetapkan sampel yang awalnya kecil kemudian meningkat. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan beberapa cara yaitu:

- a. Observasi, yaitu pengamatan langsung di lapangan
- b. Wawancara, yaitu pengajuan pertanyaan kepada informan oleh peneliti
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen tertulis maupun yang terekam Teknis Analisis Data Penelitian ini menggunakan 3 langkah dalam analisis data, antara lain:
- d. reduksi data
- e. penyajian data
- f. Penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Surat dapat dijadikan pembenaran atau bukti untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, karena surat merupakan tanda yang sah dari suatu perintah yang kuat, dibuktikan dengan tanda tangan penulis surat itu. Menulis dan mengatur surat membutuhkan perhatian khusus untuk menyampaikan maksud dan tujuan dengan baik. Menulis surat membutuhkan pemahaman tentang bahasa dan konsep format surat. Hal ini dimaksudkan agar penerima surat dapat memahami dengan jelas maksud dan tujuan surat tersebut. Bagian-bagian surat yang biasanya dicantumkan dalam surat, khususnya surat resmi, seperti surat, tanggal surat, nomor surat, alamat tujuan, badan surat, nama pengirim, dan salinannya. Fungsi surat juga untuk menyampaikan pesan atau

tujuan tertentu dari pengirim kepada penerima yang dituju. Ada banyak jenis surat mulai dari surat pribadi, surat resmi, surat resmi, memo atau bahkan surat anonim. Surat merupakan sarana komunikasi resmi yang biasanya diselenggarakan baik oleh lembaga atau instansi pemerintah maupun swasta, termasuk instansi pemerintah seperti Kementerian Keuangan Daerah Sulut dan Badan Keuangan. Dalam pembuatan surat resmi terdapat bagian surat yang biasanya menjadi format surat yaitu penomoran surat. Penomoran surat adalah kegiatan pemberian nomor dan kode pada surat. Fakta bahwa surat formal adalah formal dan mengandung aturan dan etika benar-benar perlu dipertimbangkan. Penggunaan ejaan dalam penomoran surat dinas di BKAD masih banyak mengandung kesalahan. Hal ini dikarenakan penulis tidak mengetahui aturan korespondensi formal, tidak teliti dan menyalin surat-surat lama. Kesalahan penomoran surat dinas, salah satunya ditemukan pada penggunaan huruf di belakang nomor surat. Peran penomoran surat berbasis tema merupakan kegiatan penting dalam lembaga negara. Namun terkadang masih ada karyawan yang tidak mempedulikan peran tersebut, dengan kata lain karyawan tidak mengetahui cara penulisan penomoran surat yang benar.

A. Prosedur

Implementasi kebijakan merupakan bagian terpenting dari politik. Pada tahap ini kebijakan dapat diukur sejauh mana kebijakan itu sendiri berhasil. Tujuan penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang adil tidak hanya untuk mengembalikan hak-hak dasar publik, tetapi juga hak politik, hak ekonomi, hak hukum, hak pendidikan, dan lain-lain, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa asal suku, ras, diskriminasi, agama, budaya. latar belakang lainnya (Masengi et al., 2023). Menurut Goggin, Dkk (1990), implementasi adalah tahapan dalam siklus politik yang sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan politik. Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan. (Dr. H. Tachjan, M.Si, n.d.).” Sementara itu, Hogwood Dkk. (1984) “implementasi kebijakan adalah tindakan pejabat individu atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan kebijakan. (IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK & EVIDENCE-BASE POLICY - Google Books, n.d.).” Berdasarkan observasi yang diperoleh dalam wawancara peneliti dengan beberapa informan,

maka dibuatlah SOP pengelolaan Naskah Dinas. Beberapa model bersifat normatif – mereka didasarkan pada keyakinan yang dipegang kuat tentang bagaimana organisasi harus beroperasi. Kemudian beberapa model bersifat deskriptif - yaitu, mereka mencoba mengidentifikasi karakteristik objektif penting dari organisasi ini. Dalam beberapa kasus, sulit untuk membedakan elemen normatif dari deskriptif, dan semua surat masuk dan keluar harus dimasukkan ke bagian layanan utama. Dye menggambarkan kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pertama, Dye berpendapat bahwa hanya pemerintah, bukan organisasi swasta, yang dapat membuat kebijakan publik. Kedua, Dye menegaskan kembali bahwa kebijakan publik adalah tentang pilihan yang dibuat atau tidak dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini, pilihan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tindakan sadar untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Salah satu contohnya adalah ketika pemerintah tidak menaikkan pajak, yang juga merupakan kebijakan umum (Abdal, 2015) (Abdal, 2015). Chandler dan Plano (1988) Kebijakan publik adalah penggunaan strategis sumber daya yang tersedia untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan bentuk intervensi pemerintah yang konsisten untuk kepentingan kelompok masyarakat yang lebih lemah, agar mereka dapat hidup dan berpartisipasi secara luas dalam pembangunan. Definisi Chandler dan Plano tentang kebijakan publik dapat diklasifikasikan sebagai intervensi pemerintah di bawah kebijakan, dalam hal ini pemerintah menggunakan berbagai cara untuk memecahkan masalah publik. (*ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN; PROBLEM DAN SOLUSINYA UNTUK MEMAHAMI KEBIJA... - Google Books*, n.d.). Selalu berkontribusi, membimbing dan mengarahkan karyawan, selalu berkomunikasi dengan tugas dan aktivitas utama mereka. Asas Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan naskah dinas harus dilakukan secara efektif dan efisien secara tertulis dengan menggunakan penggunaan ruang atau halaman naskah dinas, pengertian informasi dan bahasa Indonesia yang baik, benar dan mudah dipahami. “Implementasi kebijakan publik adalah pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang berhak merumuskan kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik menjadi penting karena kebijakan publik yang dirumuskan menunjukkan

kepentingannya dalam pelaksanaannya sesuai dengan maksud dan tujuan. Sedangkan, Menurut Wahab (1997), yang membahas pandangan Denhard dan Denhard, yang mengatakan bahwa “implementasi adalah tahapan tindakan atau kegiatan dimana semua perencanaan dirumuskan menjadi kebijakan operasional. Selanjutnya implementasi kebijakan dikatakan sebagai implementasi fundamental. politik keputusan, biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi bisa juga berupa perintah eksekutif penting atau keputusan pengadilan atau - keputusan (Purwanto & Sulistyastuti, 2012).” Mazmanian dan Sabatier (1986) mengatakan bahwa “memahami implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang terjadi setelah suatu program diimplementasikan atau dirumuskan”. Santoso (2009) mengemukakan bahwa “implementasi kebijakan adalah tindakan yang diambil untuk mengimplementasikan suatu kebijakan secara efektif. Implementasi kebijakan menekankan implementasi yang tepat dari tujuan kebijakan yang disajikan di sini dalam bentuk tindakan sementara. Edward III (1980) menulis bahwa salah satu kuncinya. Persoalan dalam implementasi politik adalah komunikasi, yang mengacu pada bagaimana kebijakan dipahami oleh pelaksana, sasaran dan masyarakat sekitar kebijakan. (Rantung, 2019). Dalam implementasi suatu rancangan naskah dinas, isi kebijakan naskah dinas melalui peraturan mempengaruhi satuan kerja untuk melaksanakannya. Dalam implementasi kebijakan, keterbukaan dan komunikasi merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi merupakan sarana penyebaran informasi tentang kebijakan yang dilaksanakan. Karena sosialisasi mengambil banyak bentuk, seperti peraturan tercetak, sosialisasi, lokakarya, ujian umum dan instruksi tertulis formal, pengenalan teks formal di fakultas harus mulus. Namun nampaknya implementasi tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan atau masih parsial, bahkan belum dilaksanakan. Komunikasi dapat mendukung implementasi kebijakan jika kebijakan dapat dilakukan dengan benar. Selain itu, komunikasi harus jelas dan konsisten. Hal ini sesuai dengan teori George C. Edward III tentang faktor komunikasi sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan.

B. Pengawasan

Untuk menerapkan sistem naskah dinas yang efisien dan berfungsi, keamanan naskah dan aspek legalitasnya perlu diperhatikan sebagai yang paling penting. Usulan Edward III untuk implementasi politik yang efektif adalah memperhatikan misalnya.

1. Komunikasi.

Kebijakan harus dikomunikasikan terkait kebijakan dan masyarakat baik yang menjadi sasaran maupun yang tidak menjadi sasaran kebijakan.

2. Ketersediaan sumberdaya.

Implementasi kebijakan membutuhkan tersedianya sumber daya yang berkualitas atau kompeten sesuai tujuan kebijakan.

3. Disposisi.

Implementasi kebijakan akan berhasil apabila pihak terkait memiliki sikap dan komitmen yang kuat untuk mencapai keberhasilan kebijakan.

4. Struktur birokrasi.

Implementasi kebijakan akan mudah diimplementasikan apabila sebelum dan semetara implemetasi ditunjang dengan struktur birokrasi yang menunjang implementasi.

Berdasarkan pengamatan peneliti, pengawasan langsung berasal dari bagian tata usaha, pengawasan langsung dilakukan oleh pengelola pelayanan, surat masuk dan keluar harus melalui bagian administrasi. Menurut Handoko (2016), “mengendalikan sebenarnya berarti menjaga stabilitas dan keseimbangan”. Namun, untuk mencapai keseimbangan, manajer harus terus-menerus mengubah tindakan mereka atau mengubah standar yang mereka gunakan saat ini untuk mengukur kinerja. Baik teknik dan metode pemantauan harus digunakan secara bersamaan, tidak sendirian. Robbins and Coulter (2016) menyatakan bahwa pengendalian adalah proses pemantauan kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan dilakukan sesuai rencana dan untuk membenarkan penyimpangan yang signifikan. (*Jeane Elisabeth Langkai - Google Scholar*, n.d.). Kesatuan sistem administrasi adalah wajib. Manullang (2011) menyatakan bahwa tujuan utama pemeriksaan adalah untuk melaksanakan yang tidak direncanakan. Dapat dipahami bahwa persis seperti yang dirancang, hasil maksimal tidak akan tercapai tanpa adanya fungsi monitoring. Meskipun peran pengawasan ini berada di bagian paling bawah dari peran manajemen, bukan berarti kurang penting, justru lebih signifikan sebagai kunci keberhasilan seluruh fungsi manajemen. Pengawasan oleh atasan adalah pengawasan secara

menyeluruh terhadap kinerja bawahan, yang tujuannya agar atasan mengetahui sebenarnya operasi dan pelaksanaan tugas masing-masing unit organisasi atau lingkungannya secara menyeluruh dan tidak menyimpang dari usahanya untuk mencapai tujuan dan yang telah ditetapkan. sasaran. urutan naskah dinas harus aman secara fisik dan substantif untuk penyiapan, klasifikasi dan kualifikasi, penyerahan kepada orang yang berwenang, pengarsipan, pengarsipan dan pendistribusian, Daulay (2017) menambahkan bahwa pengendalian adalah proses pemantauan pelaksanaan semua kegiatan organisasi . . memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengendalian adalah setiap usaha atau aktivitas untuk menentukan dan mengevaluasi kinerja sebenarnya dari tugas atau aktivitas, apakah sesuai dengan harapan atau tidak. (Abdal, 2015).

C. Sikap Pelaksana

Komitmen pelaksana sangat penting dalam pelaksanaan skenario dinas, skenario dinas harus diperhatikan. Proses implementasi kebijakan publik Dalam teori organisasi, tidak ada teori organisasi tunggal yang menjadi dasar analisis. Jika demikian, ada dua cara untuk memecahkan kebuntuan. Pertama, segala sesuatu mulai dari teori organisasi disintesis menjadi konsep analisis sistem yang berguna dalam analisis terapan. Kedua, menerima keragaman pemikiran organisasi yang ada dan mencoba untuk menurunkan dari keragaman tersebut beberapa model yang dapat dibedakan dan digunakan untuk menganalisis masalah aplikasi. “Implementasi kebijakan publik adalah pelaksanaan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah, yang berhak membuat kebijakan publik, melalui rumusan kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik penting karena kebijakan publik yang dirumuskan menunjukkan maknanya ketika diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan pembuat kebijakan, namun demikian menurut Wahab (1997) “Implementasi kebijakan publik adalah implementasi kebijakan dimana pemerintah memiliki kekuatan membentuk kebijakan publik melalui pembuatan kebijakan. Implementasi kebijakan publik menjadi penting karena kebijakan publik yang dirumuskan menunjukkan maknanya ketika diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan pembuat kebijakan, sedangkan Wahab (1997) mencerminkan pandangan dan pemahaman Denhard bahwa perencanaan

diformalkan menjadi praktik operasional. Selanjutnya implementasi kebijakan dikatakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi dapat juga diimplementasikan dalam bentuk peraturan atau keputusan administrasi utama atau putusan pengadilan. Kebijakan merupakan tahapan yang dilakukan setelah perumusan kebijakan berupa tindakan-tindakan tertentu dan kegiatan operasional. Kebijakan yang ditetapkan tidak berguna sampai mereka ditegakkan. Mazmanian dan Sabatier (1986) mengatakan bahwa “memahami implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang terjadi setelah program dilaksanakan atau dirumuskan” Santoso (2009) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan, mengimplementasikan kebijakan secara efektif. menetapkan ini di sana menerapkan tujuan politik sebagai tindakan sementara (*Jeane Elisabeth Langkai - Google Scholar, n.d.*)”

KESIMPULAN

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait implementasi tata naskah dinas di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsi Sulawesi utara, dapat ditarik kesimpulan bahwa belum kasimal, karena memang masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi, dapat dilihat dari penjelasan per indikator dibawah ini. 1) Prosedur. tata naskah dinas ini disesuaikan dengan aturan - aturan dinas persuratan, aturan yang telah ditetapkan dari pusat. langkah-langkah pengelolaannya, sesuai prosedur sekaligus dengan sepengetahuan kepala tata usaha. 2) Pengawasan. pengawasan langsung oleh kepala dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsi Sulawesi utara, dilakukan langsung oleh bagian tata usaha, atau kepala tata usaha, dan hal ini juga akan dilaporkan langsung dari kepala tata usaha kepada kepala badan pengelolaan keuangan dan aset, baik itu surat keluar bahkan surat masuk. 3) Sikap pelaksana. Pelaksanaan pengaturan formalisasi surat dinas melalui peraturan yang ada belum sepenuhnya dilaksanakan di bagian tata usaha. Surat resmi yang dikirim oleh administrasi tidak semuanya sesuai dengan kelengkapan surat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, koordinator program studi Ilmu Administrasi Negara, serta para

narasumber yang sudah membantu dalam memberikan informasi selama penelitian ini dilaksanakan.

REFERENCES

- Abdal. (2015). *KEBIJAKAN PUBLIK (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 37,57.
- ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ; PROBLEM DAN SOLUSINYA UNTUK MEMAHAMI KEBIJA... - Google Books.* (n.d.).
- Dr. H. Tachjan, M.Si, U. M. D. E. C. D. E. (n.d.). *Implementasi Kenijakan Publik*.
- IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK & EVIDENCE-BASE POLICY - Google Books.* (n.d.).
- Jeane Elisabeth Langkai - Google Scholar.* (n.d.).
- Masengi, E. E. (Evi), Lumingkewas, E. M. (Elvis), & Supit, B. F. (Brain). (2023). Reformasi Administrasi Publik. In *reformasi administrasi publik*. Eureka Media Aksara.
- PERANRI. (2021). Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. *Pedoman Umum Tata Naskah Dinas*, 1–114.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi kebijakan publik : konsep dan aplikasinya di Indonesia*. 194.
- Rantung, M. I. R. (2019). Implementasi Kebijakan Persyaratan Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Tondano Selatan. *Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRISTRO)*, 1(1). <https://doi.org/10.36412/jan.v1i1.1003>
- Tumbel, G. (2021). Kebijakan Pembangunan Berbasis Lingkungan di Kota Manado. *Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara*, 2(1), 38–44. <https://doi.org/10.53682/ADMINISTRO.V2I1.1678>
- Wursanto (1991) dalam bukunya “Kearsipan 1.” (2019). Bab iii landasan teori 3.1. <Http://E-Journal.Uajy.Ac.Id/7244/4/3TF03686.Pdf>, 2010, 15–48.
- Bersih, B. (2004). *Pendayagunaan Aparatur Negara Ri. April*, 2004.
- Indonesia, P. R. (2018). Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. *DPR Dan Presiden RI*, 1–66.
- Kairupan, S., Mantiri, J., Mandagi, M., & Sendouw,

- R. (2019). *Ethics of Public Services in the Department of Investment and One-Stop Integrated Services of Manado City*. <https://doi.org/10.2991/icss-19.2019.110>
- Lumingkewas, E. M. C. (2022). Prototip Perilaku Pelayanan Publik Pemerintah Desa Kabupaten Minahasa Utara. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2879>

